



PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

*Application Of Accrual-Based Accounting Standards For The Composition
Of Financial Statements In The Regional Government Of Enrekang
Regency*

Yasri Tarawiru

Email : yasri.se.ak@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

This study aims to determine the Application of Accrual Based Accounting Standards in the Compilation of Financial Statements in Enrekang District Government and to determine the factors that influence in the Implementation of Accrual Based Accounting Standards in the Compilation of Financial Statements in Enrekang District Government. The research method used in this research is a descriptive qualitative method. The results show that the application of accrual-based accounting standards in the preparation of financial reports has been implemented but in 2016 has not been fully implemented and in 2017 has been fully implemented following Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Application of Government Accounting Standards. The factors that influence the Application of Accrual Based Accounting Standards in the Compilation of Financial Statements in Enrekang District Government namely Human Resources (HR) and Facilities and Target are both very influential in the preparation of financial statements.

Keywords: Accrual Basis Accounting Standards, Financial Reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akruaI pada penyusunan laporan keuangan sudah diterapkan namun pada tahun 2016 belum diterapkan sepenuhnya dan pada tahun 2017 sudah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Dan Prasarana keduanya tersebut sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Berbasis AkruaI, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan sesuatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail, dan hal ini ditegaskan pada PP No. 71 Tahun 2010 dalam pasal 6, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*Recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya asensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *Stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabilitas.

Menurut Ritonga (2010), Basis Akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Enrekang yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil ini tentu belum memuaskan mengingat beberapa kabupaten sekitar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan kendala kabupaten Enrekang tidak mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu salah satunya ada pada tidak sesuainya pencatatan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini menggambarkan ada yang salah atau kurang efektif dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (dikutip dari [Tribun Enrekang.Com](http://TribunEnrekang.Com) diakses pada Selasa 13 Februari 2018).

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini, adalah bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. 2) Wawancara, dimana melakukan wawancara secara terstruktur kepada informan penelitian yaitu Kepala Bagian Akuntansi, KASUBID Pembukuan Dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf. 3) Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh informasi berupa data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Kabupaten Enrekang. 4) Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Identitas pegawai atau responden dalam penelitian berupa jenis kelamin, pendidikan terakhir pegawai, dan lama berkerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Kelamin Responden Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Enrekang

No.	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-laki	1 Orang
2	Perempuan	4 Orang
	Total	5 Orang

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Enrekang

Adapun jenis kelamin responden Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Bidang Akuntansi dalam penelitian ini adalah 5 orang responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. adapun jumlah responden laki-laki yaitu 1 orang dan jumlah responden perpempuan yaitu 4 orang.

Tabel 2
Jenjang Pendidikan Terakhir Responden Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Enrekang

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Total
1.	SMA/SMK	-
2.	D3	-
3.	S1	2 Orang
4.	S2	3 Orang
5.	S3	-
	Total	5 orang

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Enrekang

Adapun jenjang pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah 2 orang responden yang pendidikan terakhir S1 dan 3 orang responden yang pendidikan terakhir S2

Tabel 3
Nama Pegawai Dan Lama Bekerja Bidang Akuntansi
Badan Penegelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Enrekang

No.	Nama Pegawai	Lama Bekerja
1.	Nurjannah Mandeha, SKM. M.SI	15 Tahun
2.	Ruhama Saleh, SE. M.AP	13 Tahun
3.	Israwaty Akhmad, SE. M.AP	12 Tahun
4.	Risman, SE	10 Tahun
5.	Rahmawati, SE	8 Tahun

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Enrekang

Adapun identitas responden dalam penelitian ini adalah 1 orang responden sudah bekerja selama 15 tahun , 1 orang responden sudah bekerja selama 13 tahun, 1 orang responden sudah bekerja selama 12 tahun, 1 orang responden sudah bekerja selama 10 tahun, dan 1 orang responden sudah bekerja selama 8 tahun.

1. Penerapan

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dimana menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah standar akuntansi pemerintah mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi, KASUBID Pembukuan dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sejak Tahun 2016 sudah menerapkan basis kas menuju akrual dan pada Tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sudah menerapkan basis akrual sepenuhnya. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013, yang secara efektif mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti bahwa pada Tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dimana semua pemerintah daerah dihimbau untuk menjalankan peraturan pemerintah ini secara penuh, tetapi menurut kepala bidang bagian akuntansi bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual baru diterapkan pada Tahun 2016 dan basis akuntansi yang diterapkan yaitu basis kas menuju basis akrual tetapi pada Tahun 2017 sudah dijalankan secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi, KASUBID Pembukuan dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) Sangat berpengaruh karena proses penyusunan laporan keuangan bersumber dari SDM, sehingga SDM yang menyusun laporan keuangan harus memiliki basis bidang akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi, KASUBID Pembukuan dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf menyatakan Sangat berpengaruh karena sarana dan prasaran sangat diperlukan

dalam proses penyusunan laporan keuangan seperti seperti komputer dengan aplikasi yang update.

Pembahasan

1. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual adalah rangkaian kegiatan dari Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010. Standar akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi dimana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian akuntansi dibidang akuntansi, KASUBID Pembukuan dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf terkait penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan yang dilakukan di badan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sudah berpedoman pada Peraturan pemerintah daerah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual hanya saja dalam penerapannya pada Tahun 2016 belum sepenuhnya tetapi pada Tahun 2017 penerapannya sudah sepenuhnya menggunakan basis akrual.

Tujuan umum laporan Keuangan adalah menyajikan dan menyediakan Informasi mengenai realisasi anggaran, Saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi anggaran lebih, arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan suatu entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tabel 4
Perbandingan Antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang
Tahun 2014-2015

NO	KET	2014	2015	Selisih
1.	LRA	Rp (7.121.563.284,73)	Rp 62.384.059.850,8	Rp 69.505.623.135,53
2.	NERACA	Rp1.636.442.736.960,07	Rp1.767.601.896.543,17	Rp 131.159.159.583
3.	LO		Rp. 281.896.928.430,30	Rp 281.896.928.430,30
4.	LAK	Rp 74.376.015.716,08	Rp 82.570.945.941,54	Rp 8.194.930.225,46
5.	LPE		Rp 1.723.320.871.109,81	Rp1.723.320.871.109,81

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Enrekang

Adapun perbandingan laporan keuangan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015 yaitu :1)LRA pada tahun 2014 sebesar (Rp7.121.563.284,73) sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp62.384.059.850,8, jadi selisih LRA pada tahun 2014-2015 sebesar Rp 69.505.623.135,53, 2) Neraca pada tahun 2014 sebesar Rp1.636.442.736.960,07 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp1.767.601.896.543,17, jadi selisih Neraca pada tahun 2014-2015 sebesar Rp Rp131.159.159.583. 3) LO pada tahun 2015 sebesar Rp281.896.928.430,30. 4) LAK pada tahun 2014 sebesar Rp

74.376.015.716,08 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp82.570.945.941,54, jadi selisih LAK pada tahun 2014-2015 sebesar Rp8.194.930.225,46. 5) LPE pada tahun 2015 sebesar Rp 1.723.320.871.109,81.

Tabel 5
Perbandingan Antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang
Tahun 2016-2017

NO	KETERANGAN	2016	2017	Selisih
1.	LRA	Rp 64.741.440.130	-Rp 5.763.967.023	Rp 70.505.407.153
2.	LPSAL	Rp 6.222.557.981	Rp 6.334.184.954	-Rp 111.626.973
3.	NERACA	Rp 1.706.307.616.052	Rp 1.705.198.857.831	Rp 1.108.758.221
4.	LO	Rp 151.542.234.000	Rp 156.802.495.178	-Rp 5.260.261.179
5.	LAK	Rp 6.222.557.981	Rp 6.334.184.954	-Rp 111.626.973
6.	LPE	Rp 1.674.196.712.676	Rp 1.657.376.210.993	Rp 16.820.501.683

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Berikut perbandingan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang 2016-2017 yaitu : 1) LRA pada tahun 2016 sebesar Rp 64.741.440.130 sedangkan pada tahun 2017 sebesar -Rp 5.763.967.023, jadi selisih pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp 70.505.407.153. 2) LPSAL pada tahun 2016 sebesar Rp 6.222.557.981 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 6.334.184.954, jadi selisih pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar -Rp 111.626.973. 3) NERACA pada tahun 2016 sebesar Rp 1.706.307.616.052 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.705.198.857.831, jadi selisih pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.108.758.22. 4) LO pada tahun 2016 sebesar Rp 151.542.234.000 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 156.802.495.178, jadi selisih pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar -Rp 5.260.261.179. 5) LAK pada tahun 2016 sebesar Rp 6.222.557.981 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp6.334.184.954, jadi selisih pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar -Rp 111.626.973. 6) LPE pada tahun 2016 sebesar Rp 1.674.196.712.676 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.657.376.210.993 jadi selisih pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp 16.820.501.683.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penerapan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua yang akan diterapkan pada Tahun 2015. Dalam rangka upaya pencapaian tujuan tersebut maka pemerintah harus melakukan upaya dengan membenahi sumber daya manusianya dengan cara memberikan Sosialisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK). Dengan begitu akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berkompeten dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi, KASUBID Pembukuan dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) Sangat berpengaruh karena proses penyusunan laporan keuangan bersumber dari SDM, sehingga SDM yang menyusun laporan keuangan harus memiliki basis bidang akuntansi.

Kendala atau masalah yang dihadapi dalam Dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu setiap OPD masih terbatas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan basis pendidikan akuntansi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan baru untuk keduanya diterapkan sehingga dalam pelaksanaannya itu belum 100% mengetahui.

Adapun bentuk pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan laporan keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang diadakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknik dan arahan sebelum menyusun laporan keuangan. Dan pegawai yang menyusun laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Enrekang memang harus berlatarbelakang pendidikan akuntansi.

b) Sarana dan Prasarana

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian akuntansi di bidang akuntansi, KASUBID Pembukuan dan Pelaporan, KASUBID Neraca dan Staf mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan karena dengan adanya sarana dan prasarana sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan apalagi dalam melakukan perhitungan sangat diperlukan aplikasi komputer yang update yang dapat membantu untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan

Kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang kurangnya fasilitas dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu “Diduga Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sudah diterapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dinyatakan **ditolak**, karena standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan sudah sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Jadi hipotesis tersebut **ditolak**. Dan hopotesis yang diajukan Diduga bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dinyatakan **diterima** karena dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan Analisis Deskriptif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah kabupaten Enrekang sudah menerapkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang penerapan basis akrual. Pada tahun 2016 kabupaten Enrekang sudah menerapkan kas basis menuju akrual dan pada tahun 2017 sudah sepenuhnya menerapkan basis akrual.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yaitu Sumber daya manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana dimana kedua faktor tersebut sangat berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu. 2014. *Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Surakarta.
- Badan pengelolaan keuangan daerah. 2018. *Laporan Keuangan Tahun 2016 Dan 2017: Enrekang*.
- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT Indeks : Jakarta.
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/2014/02/15/standar-akuntansi-pemerintahan>. Diakses pada Tanggal 20 Januari 2018.
- Fakultas Ekonomi. 2017. *"Panduan Penulisan Skripsi"*. Universitas Muhammadiyah Parepare. Parepare.
- Faradillah, Andi. 2013. *Penelitian Analisis Kesiapan Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010)*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Selemba Empat: Jakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Karim, Suherman. 2018. Opini Kabupaten Enrekang. <http://makassar.tribunnews.com/2017/08/29/usai-bagi-bagi-motor-muslimin-bando-ungkap-alasan-enrekang-tak-raih-wtp>. Diakses Pada Selasa, 13 februari 2018.
- Lamonisi, Sony 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon*. (Jurnal). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado
- Langelo .2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado: Manado.

Mahsun, Muhammad. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

Miladiyah, Ana. 2013. *Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Mulyana. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. www.kemendagri.go.id/2014/01/09. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2018.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Selemba Empat: Jakarta.

Ritonga. 2010. *Standar Akuntansi Berbasis Akrual*. www.kemendagri.go.id/2010/02/19. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokusmedia: Bandung